

**EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI
DESA BALODANO KECAMATAN MA'U
KABUPATEN NIAS**

SKRIPSI

OLEH :

**YANILA HALAWA
188510058**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/1/23

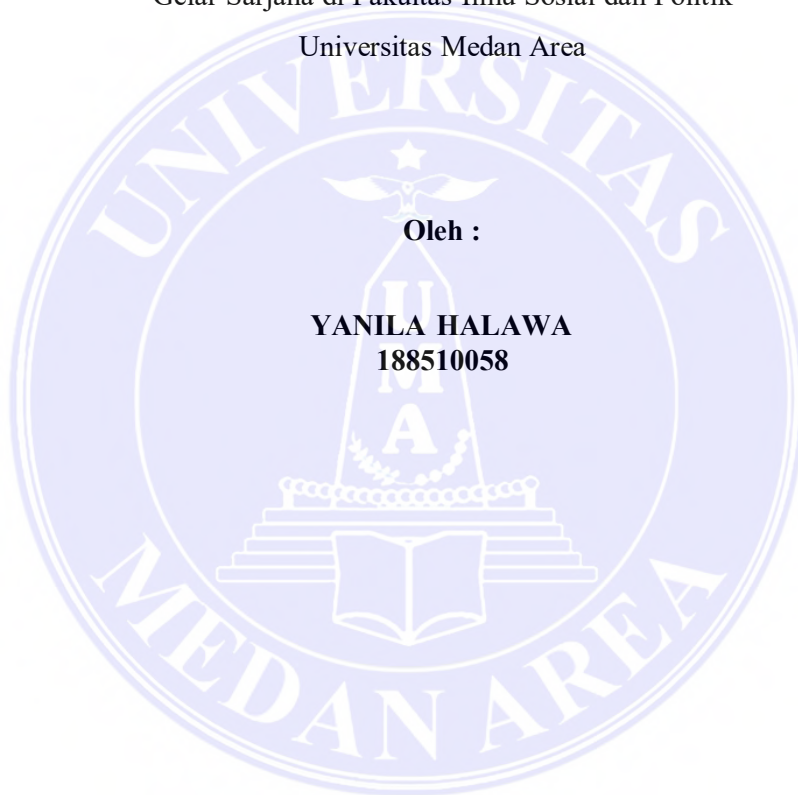
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/1/23

**EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI
DESA BALODANO KECAMATAN MA'U
KABUPATEN NIAS**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Medan Area



Oleh :

**YANILA HALAWA
188510058**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

LEMBAR PENGESAHAN

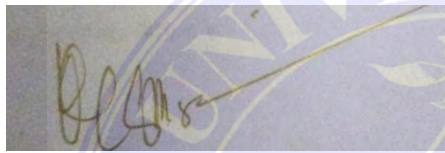
Judul Skripsi : Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Balodano Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias

Nama Mahasiswa : Yanila Halawa

N P M : 188510058

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing




Beby Masitho Batubara, S.Sos. MAP.
Pembimbing I

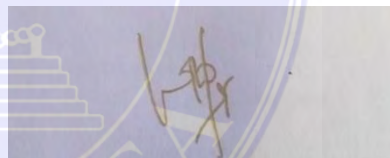


Evy Kurniaty S.Sos. M.IP.
Pembimbing II

Mengetahui :

Dr. Fajri Juliana Hasibuan, M.Si
Dekan Fakultas Isipol



Dr. Novita Wulandari, S.ST., M.Si.
Ka. Prodi

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 14 Juni 2022



Yanila Halawa
188510058

SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yanila Halawa
NPM : 188510058
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksekutif (*Non-excektiveRoyalty-free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Balodano Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksekutif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pengolahan data (*database*), merawat dan mempublishkan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 14 Juni 2022



Yanila Halawa
188510058

ABSTRAK

Isu kemiskinan merupakan masalah kronis melanda Indonesia yang sangat berpotensi menghambat pembangunan ekonomi sebagai proses alami untuk mewujudkan cita-cita yang diamanatkan kepada negara yaitu masyarakat makmur sejahtera, adil, dan merata. program keluarga harapan (PKH) di Desa Balodano dalam pelaksanaan program keluarga harapan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, terutama mengenai pendataan yang belum tepat sasaran untuk masyarakat miskin, kurangnya perhatian pemerintah desa serta tanggung jawab dalam bekerja masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi program keluarga harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Balodano Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai analisis data. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris, BPD dan masyarakat. Data dikumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Balodano Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias sejauh ini sudah berjalan dengan cukup baik namun belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari teori Malay SP Hasibuan, 2002.,p.22, yang memuat enam indikator yang digunakan antara lain prestasi, kedisiplinan, kreatifitas, kerjasama, kecakapan serta tanggung jawab pemerintah desa masih cukup baik dan disebabkan kurangnya sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana juga kurang memadai.

Kata Kunci : Evaluasi, Pemerintah Desa, Kemiskinan

ABSTRACT

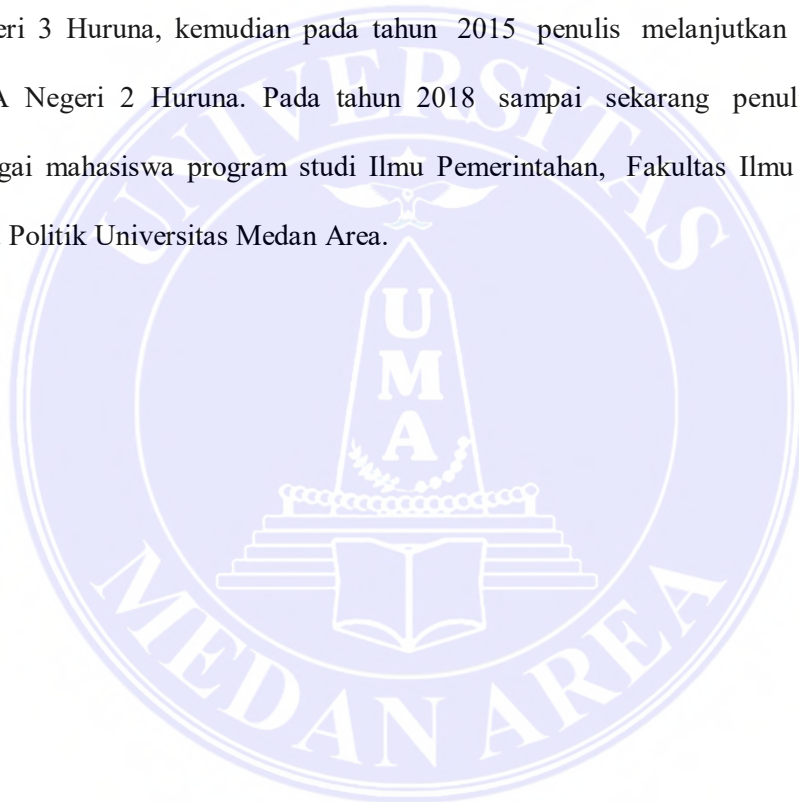
The problem is a chronic problem that plagues Indonesia which is very likely to hamper economic development as a natural process to realize the ideals mandated by the state, namely a prosperous, just and equitable society. The family of hope program (PKH) in Balodano Village in the implementation of the family of hope program has not fully run well, especially data collection that has not been well targeted for the poor, lack of attention from the village government and low responsibility in working. This study aims to determine the evaluation of the Family Hope Program (PKH) in tackling poverty in Balodano Village, Ma'u District, Nias Regency. This study uses qualitative methods as data analysis. Sources of data in this study were the Village Head, Secretary, BPD and the community. Data were collected based on data collection techniques, namely observation, interviews, documentation and data triangulation. The results showed that the evaluation of the Family Hope Program (PKH) in overcoming poverty in Balodano Village, Ma'u District, Nias Regency so far has gone well but has not been fully effective. This can be seen from the theory of Malay SP Hasibuan, 2002., p.22, which contains six indicators used, including achievement, discipline, creativity, cooperation, and village government responsibilities are still quite good and due to the lack of human resources, as well as facilities. and infrastructure is also inadequate.

Keywords: *Evaluation, Village Government, Poverty*

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Yanila Halawa, anak dari Alm. Tou'ozaro Halawa dan Atimani Gulo, lahir di Desa Balodano 12 Oktober 1999, dua puluh dua tahun lalu. Penulis merupakan anak ketiga dari 4 (empat bersaudara).

Penulis bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Nomor 071193 sifaoroasi, pada tahun 2006. Selanjutnya pada tahun 2012 penulis melanjutkan sekolah di SMP Negeri 3 Huruna, kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan sekolah di SMA Negeri 2 Huruna. Pada tahun 2018 sampai sekarang penulis terdaftar sebagai mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu yang berjudul **“Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Balodano Kecamatan Ma’u Kabupaten Nias”**.

Tujuan penyusunan proposal skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh sidang skripsi guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan program S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area. Saat penyusunan proposal skripsi ini banyak hambatan yang penulis hadapi dalam penulisan proposal skripsi. Namun berkat adanya pengarahan, bimbingan dan bantuan yang diterima akhirnya semuanya dapat diatasi dengan baik.

Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan proposal skripsi ini. Secara khusus dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku penanggung jawab penuh terhadap proses belajar mengajar di lingkungan Universitas Medan Area.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Ibu Dr. Efianti Juliana Hasibuan, M.Si selaku penanggung jawab di lingkungan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik.

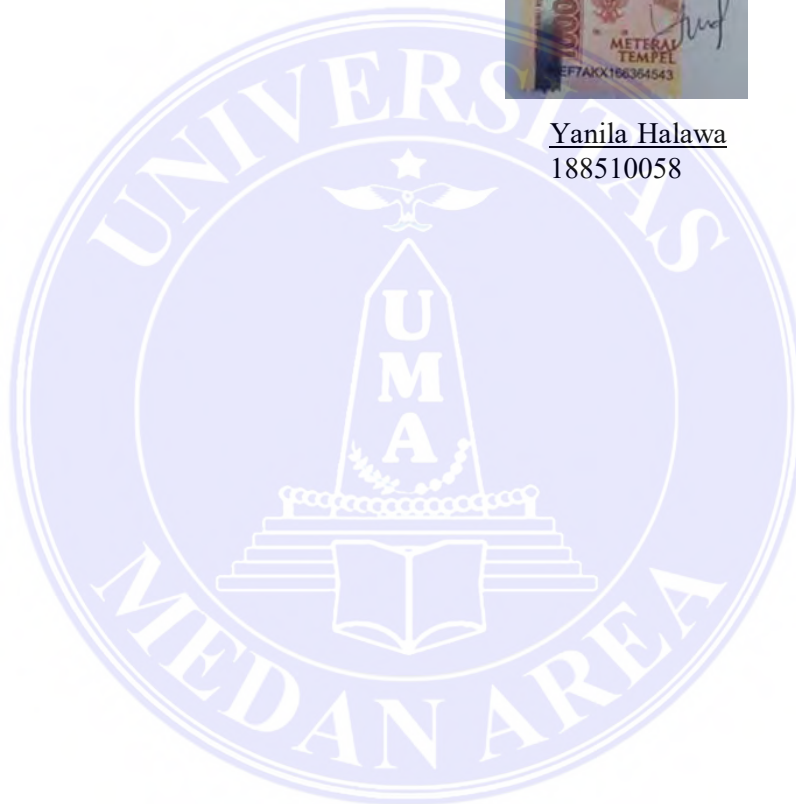
3. Ketua jurusan Ibu Dr. NovitaWulandari, S.ST, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Ibu Beby Masitho Batubara, S. Sos, MAP selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
5. Ibu Evy Yunita Kurniaty, S.Sos, M.IP selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
6. Bapak Hikmawan Syahputra, S.IP., M.AP., selaku Sekretaris yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis, Ayah alm.Tou'ozaro Halawa, Ibu Atimani Gulo, Abang, Kakak dan Adik saya, terimakasih atas cinta kasih, perhatian, pengorbanan, dukungan serta doa-doa yang tiada hentinya yang kalian berikan kepada saya.b
8. Dan seluruh teman-teman stambuk 2018 prodi Ilmu Pemerintahan yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada saya dan selama kurang lebih empat tahun bersama menerima pembelajaran dari Bapak/Ibu dosen baik suka dan duka kita telah jalani bersama-sama.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu peneliti dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat menambah kesempurnaan dari tulisan ini dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Medan, 14 Juni 2022



Yanila Halawa
188510058



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	5
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Evaluasi Program.....	7
2.1.1 Pengertian Evaluasi.....	7
2.1.2 Model Evaluasi Program.....	8
2.1.3 Tujuan dan Manfaat Evaluasi Program.....	13
2.2 Program Keluarga Harapan (PKH).....	15
2.2.1 Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH).....	15
2.2.2 Latar Belakang Program Keluarga Harapan (PKH).....	18
2.2.3 Komplementaritas dan Sinergitas Program.....	20
2.2.4 Sasaran Program Keluarga Harapan.....	21
2.3 Peran PKH dalam Pengetasan Kemiskinan.....	23
2.3.1 Bentuk dan Jenis Kemiskinan.....	25
2.3.2 Kemiskinan Pedesaan.....	26
2.3.3 Program Pengetasan Kemiskinan.....	28
2.3.4 Kesejahteraan Keluarga.....	29
2.3.5 Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga.....	31
2.4 Penelitian Terdahulu.....	35
2.5 Kerangka Pemikiran.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39

3.3	Informal Penelitian.....	41
3.4	Teknik Pengumpulan Data	42
3.5	Metode Analisis Data.....	43
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1	Hasil Penelitian.....	45
4.1.1	Sejarah Singkat Desa Balodano.....	45
4.1.2	Struktur Organisasi Desa	45
4.1.3	Tugas Pemerintah Desa Balodano Kecamatan Mau Kabupaten Nias Program Keluarga Harapan (PKH).....	46
4.2	Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Balodano.....	51
4.2.1	Prestasi (Kualitas).....	51
4.2.2	Kedisiplinan.....	53
4.2.3	Kreatifitas	55
4.2.4	Bekerjasama	56
4.2.5	Kecakapan	58
4.2.6	Tanggung Jawab.....	59
BAB V	PENUTUP	64
5.1	Kesimpulan.....	64
5.2	Saran.....	65
	DAFTAR PUSTAKA	66
	LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian	40
----------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	37
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Balodano	46



LAMPIRAN

Dokumentasi Penelitian..... 68



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu kemiskinan merupakan masalah kronis melanda Indonesia yang sangat berpotensi menghambat pembangunan ekonomi sebagai proses alami untuk mewujudkan cita-cita yang diamanatkan kepada negara yaitu masyarakat makmur sejahtera, adil, dan merata. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, “Jumlah Penduduk Indonesia” menyatakan Indonesia negara yang memiliki penduduk terbesar ke empat di dunia, memiliki jumlah penduduk sekitar 260 juta jiwa terdiri dari 17.508 pulau dengan jumlah 34 provinsi dibagi menjadi 403 Kota dan 98 kota. Dengan populasi penduduk sebesar ini, membuat Indonesia memiliki banyak sekali persoalan rumit yang terjadi di masyarakat dengan jumlah penduduk miskin yang sangat banyak. (Yasir, 2021)

Pada lima tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan baik di perkotaan atau pun dipedesaan. Badan Pusat Statistika (BPS) mengumumkan jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2019 sebanyak 25,14 juta jiwa atau 9,41% dari total 260 juta penduduk Indonesia. Jumlah penduduk miskin berkurang 529,9 ribu orang dibandingkan Maret 2018, penurunannya mencapai 805,1 orang. Presentasi tingkat kemiskinan sudah berada dalam rentang satu digit yang mana masyarakat Indonesia yang kini hidup di bawah garis kemiskinan merupakan kelompok yang benar-benar berada pada posisi paling bawah. (Yasir, 2021)

Berbicara tentang masalah-masalah sosial yang sebelumnya dijelaskan salah satunya adalah kemiskinan. Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan berbagai langkah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Menurut simanjuntak upaya-upaya menanggulangi kemiskinan sampai saat ini dinilai belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, jumlah golongan miskin bukannya berkurang, akan tetapi semakin besar dan bertambah. (Mui, 2020)

Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia untuk menekan laju pertumbuhan penduduk miskin, pemerintah meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan melalui program pengentasan kemiskinan. Beberapa program seperti berbasis perlindungan sosial JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat), RASKIN (Beras Miskin), BSM (Bantuan Siswa Miskin), PKH (Program Keluarga Harapan), PNPM (Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat), KUR (Pemberdayaan Usaha Mikro), program-program ini berdasarkan pasal 1 ayat (9) UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menentukan bahwa: “perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial”. (Infatih, 2018)

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 50/PEGHUK/2002 Tentang Tim Penanggulangan Kemiskinan Departemen Sosial Republik Indonesia; Inpres No. 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang berkeadilan pada lampiran ke I Tentang Penyempurnaan Pelaksana PKH. Program keluarga harapan lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus memutus rantai kemiskinan. PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster I (kelompok kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial, strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. (Infatih, 2018)

Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2012:19). Tujuan diberlakukannya PKH dalam jangka panjang adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok miskin. (Amelia, 2020)

Dilansir dari PKH.Kemensos.go.id program keluarga harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program perlindungan sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang diharapkan di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, Keluarga Miskin (KM) didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program

perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. (Inaya, 2021)

Sasaran atau penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin, dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran RSTM, sedangkan untuk jangka panjang, dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksa kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antar generasi. (Domri, 2019)

Kementerian Sosial RI, pada tahun 2020, akan memfokuskan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada empat kebijakan yakni Pencegahan Stunting, KPM Graduasi Berdikari Sejahtera, Validasi di wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T) dan Sinergi dengan Program Keluarga Berencana (KB). (Yunarni, 2020). Program PKH di Sumatera Utara telah ada sejak tahun 2011 dimana yang awalnya hanya terdapat di 6 kabupaten kota yaitu Kota Medan, kabupaten Nias, kabupaten Nias Utara kabupaten Nias Barat kabupaten Samosir dan kabupaten Tapanuli Tengah. (Inaya, 2021)

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Balodano yang terletak di kecamatan Ma'u kabupaten Nias, dimana didesa balodano merupakan salah satu desa yang menerima program PKH tersebut namun dalam pelaksanaannya dilapangan masih terdapat masyarakat yang kurang mampu atau prasejahtera

yang tidak menerima program PKH. Masyarakat desa balodano termasuk salah satu desa yang masih minim sumber daya manusianya, dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu rendah-nya sumber daya manusia, sehingga tidak memiliki daya saing dalam memanfaatkan peluang kerja yang ada. Rendahnya sumber daya manusia dilatar belakangi oleh tingkat pendidikan dan kesehatan yang masih rendah serta kebanyakan masyarakat di desa Balodano yang lebih memilih bekerja di usia muda sebagai buruh dan petani berdasarkan informasi dari kepala desa balodano. Desa Balodano Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias Program Keluarga Harapan (PKH) sudah terlaksana sejak tahun 2011 sampai sekarang dan pada tahun 2022 sebanyak 43 keluarga yang mendapat program PKH tersebut.

Untuk mengetahui secara jelas tentang permasalahan diatas membutuhkan suatu penelitian yang akurat. Hal ini yang memotivasi peneliti untuk memilih masalah ini dengan judul sebagai berikut: **“Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Balodano Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias Tahun 2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: **“Mengevaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Balodano Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias Tahun 2022?”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini ialah: **“Untuk Mengevaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Balodano Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias Tahun 2022”**.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Ilmu pemerintahan, Manajemen Sumber Daya Manusia dan juga yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dengan membanding-kannya pada fenomena yang terjadi di lapangan.

b. Bagi Civitas Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan, referensi, pertimbangan dan perbandingan bagi kalangan akademisi, tentang evaluasi program keluarga harapan (PKH), serta dapat menjadi acuan pada penelitian selanjutnya yang relevan atau sejenis.

c. Bagi Desa Balodano Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias

Diharapkan bagi desa Balodano hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam kinerja pegawai desa dilingkungan Desa Balodano dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dalam menanggulangi tingkat kemiskinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Evaluasi Program

2.1.1 Pengertian Evaluasi Program

Evaluasi dalam kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English* evaluasi adalah *to find Out, decide the amount or value* yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Selain arti berdasarkan terjemahan, kata-kata yang terkandung didalam definisi tersebut pun menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi dan dapat dipertanggung jawabkan. (Susanto, 2016)

Menurut Anderson, Evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Definisi lain dari evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu, juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, produser, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

Evaluasi program juga bisa diartikan sebagai sebuah proses untuk mengetahui apakah sebuah program dapat direalisasikan atau tidak dengan cara mengetahui efektivitas. Evaluasi program berfungsi untuk menentukan apakah *output* dan *outcomes* yang diharapkan dari pelaksanaan program bisa direalisasikan. Evaluasi tersebut tentunya melalui pengumpulan dan analisis data yang memadai. Dalam evaluasi program yang komprehensif, evaluasi itu mencakup:

1. Memonitoring program penilaian apakah suatu program dilaksanakan sebagaimana direncanakan. Memonitoring program ini akan memberikan umpan balik yang terus menerus pada program yang dilaksanakan dan mengidentifikasi masalah begitu muncul.
2. Evaluasi proses yaitu penilaian bagaimana program dioperasikan, berfokus pada pelaksanaan program kepada peserta (*service delivery*).
3. Evaluasi dampak yaitu penilaian apakah suatu program telah mewujudkan pengaruh terhadap individu-individu, rumah tangga, lembaga atau lingkungan hidup, dan apakah dampak tersebut dapat secara ilmiah distribusikan kepada pelaksanaan intervensi program tersebut.
4. *Cost-benefit* atau *effectiveness* adalah penilaian dari biaya program dan manfaat yang dihasilkan oleh biaya tersebut, untuk menentukan apakah manfaatnya cukup bernilai dibandingkan biaya yang digunakan.

Evaluasi program yang dilakukan merupakan bentuk akuntabilitas para pelaksana dan penanggung jawab program tersebut agar dapat selalu meyakinkan bahwa tujuan program dapat dicapai dan sesuai dengan visi misi yang dijalankan oleh instansi. Akuntabilitas program akan dapat dinilai dari hasil program tersebut yang dinikmati oleh peserta program atau masyarakat yang menjadi target group program. (Susanto, 2016)

2.1.2 Model Evaluasi Program

Model evaluasi merupakan suatu desain yang dibuat oleh pakar evaluasi, biasanya model evaluasi ini dibuat berdasarkan kepentingan seseorang, lembaga atau instansi yang ingin mengetahui apakah program yang telah dilaksanakan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Ada banyak model yang bisa digunakan

untuk mengevaluasi suatu program. Meskipun antara satu dengan lainnya berbeda, namun maksudnya sama yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi yang berkenaan dengan objek yang akan dievaluasi.

Ada delapan model evaluasi yang disajikan oleh Arikunto dalam salah satu bukunya yaitu:

1. *Goal Oriented Evaluation Model*, dikembangkan oleh Tyler. Model ini merupakan yang muncul paling awal. Yang menjadi objek pengamatan pada model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimulai.
2. *Goal Free Evaluation Model*, dikembangkan oleh Scriven. Model ini dapat dikatakan berlawanan dengan model pertama yang dikembangkan oleh Tyler. Model ini memantau tujuan, yaitu sejak awal proses terus melihat sejauh mana tujuan tersebut sudah dapat dicapai.
3. *Formatif Summatif Evaluation Model*, dikembangkan oleh Michael Scriven. Model ini menunjukkan adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan (evaluasi formatif) dan ketika program sudah selesai (evaluasi sumatif).
4. *Countenance Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stake. Model ini menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok, yaitu (1) deskripsi dan (2) pertimbangan.
5. *CSE-UCLA Evaluation Model*, menekankan pada “kapan” evaluasi dilakukan. Model ini mempunyai lima tahap yang dilakukan dalam evaluasi, yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil, dan dampak.

6. CIPP Evaluation Model, dikembangkan oleh Stufflebeam. Model ini merupakan model yang paling banyak dikenal dan diterapkan oleh para evaluator. Model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Jadi, jika evaluator sudah menentukan model CIPP sebagai model yang akan digunakan untuk mengevaluasi program yang digunakan maka mau tidak mau harus menganalisis program tersebut berdasarkan komponen-komponennya.
7. *Discrepancy* Model, dikembangkan oleh Provus. Model ini menekankan pada pandangan adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program. Evaluasi program yang dilakukan adalah mengukur besarnya kesenjangan yang ada di setiap komponen.

Hanya saja dalam konteks ini penulis akan menggunakan model evaluasi seperti yang dikembangkan oleh Stufflebeam, dkk di *Ohio State University*, yakni: CIPP Evaluation Model. CIPP merupakan sebuah singkatan dari huruf awal empat buah kata, yaitu:

- *Context Evaluation* : Evaluasi terhadap konteks
- *Input Evaluation* : Evaluasi terhadap masukan
- *Process Evaluation* : Evaluasi terhadap proses
- *Product Evaluation* : Evaluasi terhadap hasil

Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan. Model CIPP ini juga model evaluasi yang melihat program yang dievaluasi sebagai sistem. Artinya, jika evaluator menentukan model CIPP sebagai model yang digunakan untuk mengevaluasi program, maka mau tidak

mau evaluator harus menganalisis program tersebut berdasarkan komponen – komponennya.

a. Evaluasi Konteks

Evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan program.

b. Evaluasi Masukan

Tahap kedua dari model CIPP ini adalah evaluasi masukan. Pada tahap ini segala sesuatu yang berpengaruh terhadap proses pelaksanaan evaluasi harus disiapkan dengan benar. Evaluasi masukan ini akan memberikan bantuan agar dapat memberikan keputusan, menentukan sumber – sumber yang dibutuhkan. Mencari berbagai alternatif yang akan dilakukan, menentukan rencana yang matang, membuat strategi yang akan dilakukan dan memperhatikan prosedur kerja dalam mencapainya.

c. Evaluasi Proses

Evaluasi proses dalam model CIPP ini menunjukkan pada “apa” (what) kegiatan yang dilakukan dalam program, “siapa” (who) orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, “kapan” (when) kegiatan akan selesai. Dalam model CIPP, evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana.

Stufflebeam mengusulkan pertanyaan – pertanyaan untuk proses antara lain:

- Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal?

- Apakah staf yang terlibat di dalam pelaksanaan program akan sanggup menagani kegiatan selama program berlangsung dan kemungkinan jika dilanjutkan?
- Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaatkan secara maksimal?
- Hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai selama pelaksanaan program dan kemungkinan jika program dilanjutkan?

d. Evaluasi Hasil

Evaluasi hasil ini digunakan untuk menentukan keputusan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Dengan demikian, evaluasi ini diarahkan pada keseluruhan dampak dari suatu program terhadap penerima (masyarakat penerima program). Sehingga, pertanyaan utama pada evaluasi ini adalah:

1. Kapan suatu program bisa dikatakan telah berhasil mencapai tujuannya?
2. Bagaimana masyarakat akan menjadi berbeda setelah menerima program tersebut?

Kriteria keberhasilan ini bisa mencakup:

- Berorientasi pada program. kriteria keberhasilan pada umumnya dikembangkan berdasarkan cakupan ataupun hasil dari suatu program. Misalnya, presentase cakupan program terhadap populasi sasaran.
- Berorientasi pada masyarakat. Kriteria keberhasilan pada umumnya dikembangkan berdasarkan pada perubahan perilaku masyarakat. Misalnya munculnya sikap kemandirian dan lain sebagainya.

2.1.3 Tujuan dan Manfaat Evaluasi Progam

Tujuan dari kegiatan evaluasi program yaitu untuk mengetahui pencapaian tujuan program dengan langkah mengetahui keterlaksanaan kegiatan program, karena seseorang yang ingin mengetahui bagian mana dari komponen dan subkomponen program yang belum terlaksana dan apa sebabnya perlu memperjelas dirinya dengan apa tujuan program yang akan di evaluasi.

Menurut Isbandi Rukminto, mengutip pendapat Feurstein sekalipun tidak secara langsung menyebut sebagai tujuan dari pelaksanaan evaluasi, namun dia mengatakan ada sepuluh alasan, mengapa suatu evaluasi perlu dilakukan, yaitu:

1. Untuk melihat apa yang sudah dicapai
2. Melihat kemajuan dikaitkan dengan tujuan program
3. Agar tercapai manajemen yang lebih baik
4. Mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan, untuk memperkuat program
5. Melihat perbedaan yang sudah terjadi setelah diterapkan suatu program
6. Melihat apakah biaya yang dikeluarkan cukup rasionable
7. Untuk merencanakan dan mengelola kegiatan program secara lebih baik
8. Melindungi pihak lain agar tidak terjebak dalam kesalahan yang sama atau mengajak pihak lain untuk melaksanakan metode yang serupa bila metode tersebut telah terbukti berhasil dengan baik
9. Agar memberikan dampak yang lebih luas, dan memberi kesempatan untuk mendapat masukan dari masyarakat.

Dalam organisasi pendidikan, evaluasi program dapat disamaartikan dengan kegiatan supervisi. Supervisi diartikan sebagai upaya mengadakan peninjauan untuk memberikan pembinaan maka evaluasi program adalah langkah awal dalam

supervisi, yaitu mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian pembinaan yang tepat.

Evaluasi program sangat erat sekali hubungan dengan kebijakan, karena program adalah rangkaian kegiatan sebagai realisasi dari suatu kebijakan. Apabila suatu program tidak dievaluasi maka tidak dapat diketahui bagaimana dan seberapa tinggi kebijakan yang sudah dikeluarkan dapat terlaksana. Informasi yang diperoleh dari kegiatan evaluasi sangat berguna bagi pengambilan keputusan dan kebijakan lanjutan dari program. Ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil dalam pelaksanaan sebuah program keputusan, yaitu:

1. Menghentikan Program, karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan.
2. Merevisi Program, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan (terdapat kesalahan tetapi hanya sedikit).
3. Melanjutkan Program, karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat.
4. Menyebarluaskan Program (melaksanakan Program di tempat- tempat lain atau mengulangi lagi program di lain waktu), karena program tersebut berhasil dengan baik maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat dan waktu yang lain. (Susanto, 2016)

2.2 Program Keluarga Harapan (PKH)

2.2.1 Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar. Peserta Program Keluarga Harapan adalah rumah tangga sangat miskin yang sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program, yaitu memiliki ibu hamil/melahirkan/nifas, dan atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan atau memiliki anak usia SD dan SLTP dan anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.(Aldzuhri, 2021)

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang bertujuan:

1. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen, sebagai berikut :

1. Kesehatan
2. Pendidikan
3. Kesejahteraan sosial

Sasaran PKH Akses merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan di wilayah PKH Akses yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. PKH Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wilayah:

1. Pesisir dan pulau kecil
2. Daerah tertinggal/terpencil
3. Perbatasan antarnegara

Program Keluarga Harapan adalah suatu program penanggulangan kemiskinan yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM), yaitu program pemerintah yang tertuang dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) tahun 2005 sampai 2025, sebagai imbalan KSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan Pedoman Umum Program Keluarga Berencana. Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan yang termasuk dalam klaster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Peserta Program Keluarga Harapan memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mendapatkan haknya, khususnya kewajiban yang terkait dengan kesehatan dan pendidikan. Kewajiban dibidang kesehatan berkaitan dengan pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, pemberian asupan gizi dan imunisasi anak balita sehingga dapat mengurangi angka kematian ibudan angka kematian balitasesuai program prioritas dalam pencapaian indicator MDGs. Di bidang pendidikan, peserta Program Keluarga Harapan memiliki kewajiban terkait dengan menyekolahkan anak kesekolah dasar, lanjutan dan menengah (SD sampai dengan SMA) termasuk anak dibidang disabilitas.

Selain mendaftarkan peserta didik, peserta didik anggota Program Keluarga Harapan tersebut harus memiliki jumlahkehadiran yang ditetapkan dalam program yaitu minimal 85% dari hari belajar efektif dalam sebulan, dengan demikian diharapkan kualitas pendidikan akan meningkat. Program Keluarga Harapan memberi manfaat jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendek, Program Keluarga Harapan akan memberikan efek pendapatan kepada rumah tangga sangat miskin melalui pengurangan beban pengeluaran beban pengeluaran rumah tangga. Sedangkan untuk jangka panjang program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan agar generasi meningkatkan kualitas kesehatan pendidikan dan kapasitas anak miskin. Secara factual dan menurut teori yang ada, tingkat kemiskinan suatu rumah tangga secara umum terkait dengan tingkat kesehatan dan pendidikan. Rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, untuk tingkat rendah sekalipun. (Fajriati, 2020)

Pemeliharaan kesehatan ibu hamil pada keluarga sangat miskin sering memadai sehingga menyebabkan buruknya kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan dan bahkan berdampak pada tingginya kematian bayi. Rendahnya kondisi kesehatan miskin juga berdampak pada tidak optimalnya proses tumbuh kembang anak, terutama pada usia 0-5 tahun. Pada tahun 2003 misalnya, angka kematian balita pada tingkat pendapatan terendah adalah 70% per 100 kelahiran hidup. Sementara pada kelompok penduduk berpendapatan tertinggi hanya 22% per 1000 kelahiran hidup. Gizi kurang berdampak buruk pada produktivitas dan daya tahan tubuh seseorang sehingga menyebabkan kelompok ini terperangkap dalam siklus kesehatan yang buruk. Seringnya tidak masuk sekolah karena sakit dapat menyebabkan anak putus sekolah. Kondisi kesehatan dan gizi mereka yang buruk juga menyebabkan mereka tidak dapat berprestasi di sekolah.

Dari sudut pandang kebijakan, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga miskin. Program Keluarga Harapan (PKH) yang mewajibkan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) memenuhi kewajibannya dibidang Kesehatan dan Pendidikan. Akan membawa perubahan perilaku RSTM atau KSM terhdap pentingnya kesehatan dan pendidikan .Pada akhirnya, implikasi positif dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan harus bisa dibuktikan secara empiris. Untuk itu, pelaksanaan PKH juga akan diikuti dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. (Fajriati, 2020)

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dan melibat berbagai sector yang didalamnya memerlukan

kontribusi dan komitmen kementerian/lembaga meliputi : BAPPENAS, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi Dan Informatika, kementerian tenaga kerja dan Transmigrasi, TNP2K, BPS dan pemerintahan daerah serta lembaga keuangan dalam penyaluran bantuan bagi peserta PKH. (Fajriati, 2020)

2.2.2 Latar Belakang Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus kebijakan dibidang perlindungan sosial, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Langsung (BLT) yang saat ini dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). Program Bantuan Tunai Bersyarat initelah dilaksanakan di beberapa Negara yang dikenal dengan *Conditional Cast Transfer* (CCT) dan cukup berhasil dalam penanggulangan kemiskinan tersebut. (Jannah, 2019)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Miskin (KM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Program PKH ini merupakan program yang dibuat oleh Kementerian Sosial RI yang berlandaskan pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendali Program keluarga Harapan” tanggal 21 september 2007.

Tujuan utama PKH adalah meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Sasaran penerima PKH adalah Keluarga Miskin (KM) yang memenuhi minimal satu dari kriteria yang terdiri dari anak 0-21 tahun, ibu hamil/nifas, lansia diatas 70 tahun dan Disabilitas Berat. Penerima bantuan PKH adalah ibu atau wanita yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada ibu maka nenek, tante, bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan).

Program Keluarga Harapan (PKH) diluncurkan presiden SBY di Gorontalo Juli 2007. Pada tahap awal dilakukan di tujuh provinsi melibatkan 500.000 Kepala rumah tangga yang sangat miskin (TRSM). Tujuh provinsi yaitu : gorontalo, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Tahun 2007 merupakan tahap awal pengembangan Program atau tahap uji coba adalah untuk menguji berbagai instrument yang diperlukan dalam pelaksanaan PKH. Seperti antara lain model penentuan sasaran, verifikasi persyaratan, mekanisme pembayaran, dan pengaduan masyarakat. Pada tahun 2008, ditambah lagi menjadi 13 Provinsi. Enam tambahan itu adalah Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Banten, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan. PKH sudah dilaksanakan di 72 Kabupaten di 13 Provinsi dengan penerima 700 ribu Keluarga Sangat Miskin (KSM) pada tahun 2008.

Program Keluarga Harapan tidak sama dengan atau bukan lanjutan Program Subsidi Langsung Tunai (BLT) yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka

membantu Keluarga Sangat Miskin mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Program Keluarga Harapan lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun system pembangunan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. Berdasarkan pengalaman pengalaman Negara lain, Program serupa sangat bermanfaat bagi keluarga miskin terutama dengan kemiskinan kronis. (Jannah, 2019)

2.2.3 Komplementaritas dan Sinergitas Program

PKH sebagai program perlindungan sosial yang berfokus pada perbaikan kualitas hidup dasar masyarakat miskin akan menjadi dasar penargetan program-program jaminan dan perlindungan sosial lainnya.

1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Seluruh peserta PKH pada saat yang bersamaan juga adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari program JKN. Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui JKN yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan. Lebih dari itu, secara bertahap cakupan peserta akan diperluas meliputi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bayi yang lahir dari PBI yang selama ini tidak dijamin.

2. Beras untuk masyarakat sejahtera (Rastra)

Seluruh penerima PKH berhak menjadi penerima bantuan beras bersubsidi (Rastra) yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan

anggota keluarga. Rastra diberikan sebanyak 15 kg/bulan dengan harga tebus Rp. 1600/kg. (Wulandari, 2020)

3. Program Indonesia Pintar (PIP)

- a. Meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 tahun.
- b. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.
- c. Menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah atau Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun lembaga kursus dan pelatihan.

2.2.4 Sasaran Program Keluarga Harapan

Sasaran peserta PKH adalah keluarga miskin dan yang memiliki komponen kesehatan (ibu hamil, nifas, balita, anak pra sekolah) dan komponen pendidikan (SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat) atau anak usia 6- 21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun, penyandang distabilitas berat dan lanjut usia diatas 70 tahun Program Keluarga Harapan terdiri atas tiga komponen yaitu antara lain:

1. Pendidikan

Menurut UU No 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Kesehatan

Menurut UU No 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

3. Kesejahteraan Sosial

Menurut UU No. 11 tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. (Wulandari, 2020)

Akses terhadap pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang diberikan tersebut diharapkan mampu mengubah perilaku masyarakat (miskin) agar lebih peduli terhadap pendidikan dan kesehatan generasi penerusnya, sehingga mampu menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan, dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri masyarakat miskin.

Program Keluarga Harapan dilaksanakan secara berkelanjutan yang dimulai pada tahun 2007 di tujuh Provinsi. Sampai dengan tahun 2015, PKH telah dilaksanakan di 34 Provinsi dan mencakup 472 Kabupaten/Kota dan 6.080 Kecamatan. Target peserta PKH pada tahun 2016 mencapai 6 juta keluarga miskin di 514 Kabupaten/Kota.(Wulandari, 2020)

2.3 Peran PKH dalam Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar kebutuhan dasar rata-rata pada suatu daerah. Kondisi

ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah bukan saja berakibat pada tidak tercukupinya kebutuhan dasar akan tetapi berdampak pada ketidakmampuan memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.(Aldzuhri, 2021)

Kemiskinan (*Poverty*) merupakan istilah yang menyatakan tidak adanya kenikmatan hidup dan persediaan kebutuhan tidak sebanding. Istilah ini didefinisikan sebagai suatu titik kehilangan untuk pemeliharaan efisiensi secara fisik. Atau suatu keadaan ekonomi dimana terbatasnya peluang atau kesempatan yang dimiliki kelompok tersebut dalam mengakses sumber daya pembangunan.

Dari banyaknya definisi kemiskinan dikaji kembali dan diperluas berdasarkan permasalahan-permasalahan dan faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan. Kajian tersebut dapat terlihat pada definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers menyatakan definisi kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi yaitu:

a. Kemiskinan (*Proper*)

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pada kelompok yang telah memiliki pendapatan namun tidak mampu mencukupi kebutuhannya.

b. Ketidakberdayaan (*powerless*)

Rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau kelompok orang terutama dalam

memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

c. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*State of Emergency*)

Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang tak terduga, dimana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan yang cukup untuk menyelesaikannya.

d. Ketergantungan (*dependence*)

Lemahnya kekuatan sosial dari seseorang atau kelompok orang yang disebut miskin menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi.

e. Keterasingan (*isolation*)

Dengan keterasingan yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Umumnya kondisi ini berada pada daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi. (Paisah, 2019)

Dengan demikian dapat difahami bahwa masyarakat miskin merupakan masyarakat yang selalu berada pada kondisi ketidakberdayaan atau ketidakmampuan mereka dalam hal memenuhi kebutuhan dasar, yaitu ketidakmampuan dalam : (1) Melakukan kegiatan usaha produktif, (2) Menjangkau akses sumber daya sosial-ekonomi (3) Menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah.(Aldzuhri, 2021)

2.3.1 Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Masalah kemiskinan dan faktor penyebab kemiskinan memperluas pandangan ilmu pengetahuan bahwa kemiskinan tidak hanya sekedar tidak

dapatnya seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional. Berdasarkan permasalahan tersebut kemiskinan memiliki 4 bentuk yakni sebagai berikut :

a. Kemiskinan absolut

Kemiskinan absolute adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada dibawah garis kemiskinan, sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

b. Kemiskinan relatif

Kemiskinan relative diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi Karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan.

c. Kemiskinan cultural

Kemiskinan yang mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai, orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan masyarakat modern.

d. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan structural adalah kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumberdaya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan.

Dari penjelasan bentuk kemiskinan seperti yang telah dijelaskan diatas dapat dipahami bahwa kemiskinan yang merupakan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan mampu menumbuhkan perilaku dan mentalitas miskin yang bermuara pada hilangnya kemerdekaan dalam berusaha dan menikmati kesejahteraan secara bermartabat.

Setelah mengenal bentuk kemiskinan berikut ini adalah jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya:

- a. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya secara umum (jalan raya, listrik, air bersih). Umumnya kondisi ini dialami oleh daerah yang belum terjangkau oleh pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.
- b. Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau kemiskinan yang membuat masyarakat sulit untuk menguasai sumber daya alam, sarana umum dan fasilitas ekonomi secara merata.

2.3.2 Kemiskinan Perdesaan

Definisi mengenai kemiskinan secara berbeda oleh beberapa badan/instansi dan para ahli. Kemiskinan didefinisikan dengan dimensi yang lebih luas, yaitu kondisi terjadinya kekurangan pada taraf hidup manusia secara fisik (kebutuhan dasar materi dan biologis termasuk kekurangan nutrisi, kesehatan, pendidikan, dan perumahan) serta sosial berupa risiko kehidupan, kondisi ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kepercayaan diri yang kurang. (Ekardo, 2018)

Kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar untuk kehidupan yang layak, berupa kebutuhan dasar makanan maupun kebutuhan dasar

bukan makanan. Kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Sementara yang dimaksud basis kekuasaan sosial yaitu

1. Modal produktif atas aset, misalnya tanah, rumah, peralatan dan kesehatan.
2. Sumber keuangan, seperti pendapatan dan kredit yang memadai
3. Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti koperasi.
4. Network atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan keterampilan yang memadai.
5. Informasi-informasi yang berguna bagi kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat dinyatakan miskin ditandai dengan adanya ketidakberdayaan atau kemampuan (*powerlessness*) dalam hal, yaitu: (Buku Pedoman Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2003)

1. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan (*basic need deprivation*)
2. Melakukan kegiatan yang tidak produktif (*unproductiveness*)
3. Tidak dapat menjangkau akses sumber sosial dan ekonomi (*inaccessibility*)
4. Menentukan nasibnya sendiri dan mendapatkan perlakuan diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan, serta sikap apatis dan vatalistik (*vulnerability*) dan Membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa mempunyai martabat harga diri yang rendah (*no freedom for poor*).

2.3.3 Program Pengentasan Kemiskinan

Merespon permasalahan kemiskinan pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dan untuk meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan presiden telah mengeluarkan perpres No. 15 Tahun

2010 tentang penanggulangan kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8% sampai 10% pada akhir 2014. Melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi Wakil Presiden Republik Indonesia, telah mengklasifikasikan kebijakan dalam tiga kelompok (cluster) yaitu sebagai berikut:

a. Klaster I

Klaster I adalah kelompok kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. Fokus utama kebijakan ini adalah untuk pemenuhan hak dasar yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan yang lebih baik. Mekanisme pelaksanaan program bersifat langsung dan klasifikasi program ini meliputi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

b. Klaster II

Klaster II adalah kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Fokus utama program ini adalah untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan yang dimaksudkan agar masyarakat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensiyadan sumberdaya yang dimiliki. Jenis program klaster II ini adalah PNPM Mandiri.

c. Klaster III

Klaster III adalah kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat usaha mikro yang memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya dengan memberikan modal atau

pembiayaan dalam skala mikro. Program pada kluster III ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa adanya keseriusan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Hal ini terbukti dengan adanya program-program penanggulangan kemiskinan yang diberikan pemerintah salah satunya adalah PKH yang berupa bantuan tunai bersyarat yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin. (Yolanita, 2019)

2.3.4 Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan berkaitan dengan suatu kondisi yang ditandai dengan terciptanya rasa aman, selamat dan tentram. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 disebutkan bahwa Kesejahteraan Sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pada dasarnya Kesejahteraan sosial merupakan pengembangan pemikiran, strategi, dan teknik untuk meningkatkan derajat kesejahteraan suatu masyarakat. (Rahayu, 2019)

Keluarga ialah kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah group yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dengan wanita, perhubungan yang mana sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang belum dewasa.

Menurut Mudrock dalam lestari keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerjasama ekonomi, dan terjadi

proses reproduksi. Sedangkan menurut Korner dan Fitzpatrick dalam Lestari keluarga setidaknya dapat ditinjau berdasarkan tiga sudut pandang yaitu definisi struktural, fungsional dan interaksional. (Rahayu, 2019)

- a. Definisi struktural, keluarga didefinisikan berdasarkan kehadiran anggota keluarga, seperti orang tua, anak, dan kerabat lainnya. Definisi ini memfokuskan pada siapa yang menjadi bagian dari keluarga.
- b. Definisi fungsional, keluarga diartikan dengan penekanan terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi psikologi sosial. Fungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi.
- c. Definisi interaksional, keluarga merupakan kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga, berupa ikatan emosi, pengalaman historis dan cita-cita masa depan.

Menurut Ahmadi suatu ikatan keluarga ditandai atau didahului dengan suatu perkawinan. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan merupakan syarat yang mutlak untuk terbentuknya suatu keluarga. Jadi faktor-faktor yang terpenting dalam keluarga ialah adanya ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dimana didahului dengan pernikahan. (Rahayu, 2019)

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992, Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup material dan spiritual yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Taraf kesejahteraan tidak hanya berupa ukuran yang terlihat (fisik dan kesehatan) tapi juga tidak dapat dilihat (spiritual).

- a. *Economical well-being* : yaitu kesejahteraan ekonomi; indikator yang digunakan adalah pendapatan. (pendapatan per kapita perbulan)
- b. *physical well-being*, yaitu kesejahteraan fisik; indikator yang digunakan adalah status gizi, status kesehatan.
- c. *psychological/spiritual* mental, yaitu kesejahteraan psikologi; indikator yang digunakan adalah sakit jiwa, tingkat stres, tingkat bunuh diri, tingkat perceraian, tingkat aborsi, tingkat kriminal (perkosaan, pencurian/perampokan, penyiksaan/pembunuhan, penggunaan narkoba), tingkat kebebasan seks. (Saputra, 2019)

2.3.5 Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga

1. Faktor Intern Keluarga

a. Jumlah Anggota Keluarga

Pada zaman seperti sekarang ini tuntutan keluarga semakin meningkat tidak hanya cukup dengan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan, pendidikan, dan sarana pendidikan), tetapi kebutuhan lainnya seperti hiburan, rekreasi, sarana ibadah, sarana untuk transportasi dan lingkungan yang serasi, kebutuhan diatas akan lebih memungkinkan dapat terpenuhi jika jumlah anggota keluarga dalam jumlah kecil.

b. Tempat Tinggal

Keadaan tempat tinggal yang diatur sesuai dengan selera keindahan penghuninya, akan lebih menimbulkan suasana yang tenang dan menggembirakan serta menyejukkan hati. Sebaliknya tempat tinggal yang tidak teratur, tidak jarang menimbulkan kebosanan untuk menempati. Kadang-kadang sering terjadi ketegangan antara anggota keluarga yang disebabkan kekacauan pikiran karena

tidak memperoleh rasa nyaman dan tentram. Akibat tidak teraturnya sarana dan keadaan tempat tinggal. (Saputra, 2019)

c. Keadaan Keluarga

Keadaan sosial dalam keluarga dapat dikatakan baik atau harmonis, bila mana ada hubungan yang baik dan benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Manifestasi dari pada hubungan yang benar-benar didasari dari ketulusan hati dan rasa penuh kasih sayang, nampak dengan adanya saling menghormati, toleransi, bantu-membantu dan saling mempercayai.

d. Keadaan Ekonomi Keluarga

Ekonomi dalam keluarga meliputi keuangan dan sumber-sumber yang dapat meningkatkan taraf hidup anggota keluarga makin terang pula cahaya kehidupan keluarga. Jadi semakin banyak sumber-sumber keuangan/pendapatan yang diterima, maka akan meningkatkan taraf hidup keluarga.

2. Faktor Ekstern

Kesejahteraan keluarga perlu dipelihara dan terus dikembangkan terjadinya kegoncangan dan ketegangan jiwa diantara anggota keluarga perlu dihindarkan, karena hal ini dapat mengganggu ketentraman dan kenyamanan kehidupan dan kesejahteraan keluarga.

Menurut UU No. 10 tahun 1992 memberikan batasan tentang keluarga sejahtera yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang, antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggunakan indikator untuk keluarga sejahtera yaitu :

1. Pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari
2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda yakni untuk dirumah, tempat pekerjaan, tempat belajar (sekolah) dan berpergian.
3. Rumah yang ditempati mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
4. Bila ada keluarga yang sakit di bawa ke sarana kesehatan.
5. Bila pasangan usia subur ingin berkeluarga berencana (KB) pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah. Dan apabila indikator tersebut tidak terpenuhi maka oleh BKKBN di katakan keluarga pra-sejahtera (pedoman pendataan BKKBN). (Saputra, 2019)

Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS II) atau indikator “kebutuhan psikologis” (*psychological needs*) keluarga sejahtera yaitu: Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Pengertian anggota keluarga melaksanakan ibadah adalah kegiatan keluarga untuk melaksanakan ibadah, sesuai dengan ajaran agama/kepercayaan yang dianut oleh masing-masing keluarga/anggota keluarga. Ibadah tersebut dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh keluarga di rumah, atau di tempat-tempat yang sesuai dengan ditentukan menurut ajaran masing-masing agama/kepercayaan.

Kesejahteraan keluarga adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat. Keluarga sejahtera

merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder dalam kehidupan suatu keluarga di masyarakat. (Saputra, 2019)

Indikator keluarga sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok bagi keluarga. Indikator keluarga sejahtera pada dasarnya disusun untuk menilai taraf pemenuhan kebutuhan keluarga yang dimulai dari kebutuhan yang sangat mendasar sampai dengan pemenuhan kebutuhan yang diperlukan untuk pengembangan diri dan keluarga. Pemenuhan kebutuhan dibagi menjadi kebutuhan dasar dan kebutuhan pendidikan. (Saputra, 2019)

2.4 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dan relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian relevan ini menjadi titik tolak ukur untuk peneliti dalam melakukan penelitian, berikut merupakan penelitian yang relevan.

1. Penelitian Rizki Regeras (2019)

Dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal”. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di kelurahan panggung kecamatan tegal timur kota tegal pada kategori efektif dengan total skor 4806 yang didapatkan dari perhitungan rumus rentang skala. (2) kendala yang dihadapi adalah masih ditemukan sebagian kecil KPM PKH yang menggunakan dana bantuan PKH dengan kurang bijak atau kurang produktif dan masih terdapat sebagian KPM PKH yang masih memandang persoalan pendidikan dan kesehatan dengan sebelah mata (3) maka solusi yang direkomendasikan adalah perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus agar

timbul kesadaran KPM PKH untuk menggunakan dana bantuan PKH dengan bijak dan produktif serta perlu dilakukan penegasan terhadap aturan atau sanksi yang diberikan kepada KPM PKH yang tidak menjalankan kewajiban dan komitmennya.

2. Penelitian Apando Ekardo (2016)

Dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir”. Penelitian dilakukan dengan kualitatif tipe deskriptif. Informan dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PKH di Nagari Lagan Hilir Punggasan sudah efektif jika dilihat dari tujuan program. Namun di sisi lain penetapan sasaran penerima bantuan PKH bagi RTSM di Nagari Lagan Hilir Punggasan belum bisa dikatakan efektif penentuan sasaran belum tepat sasaran.

3. Penelitian Namira Inaya (2021)

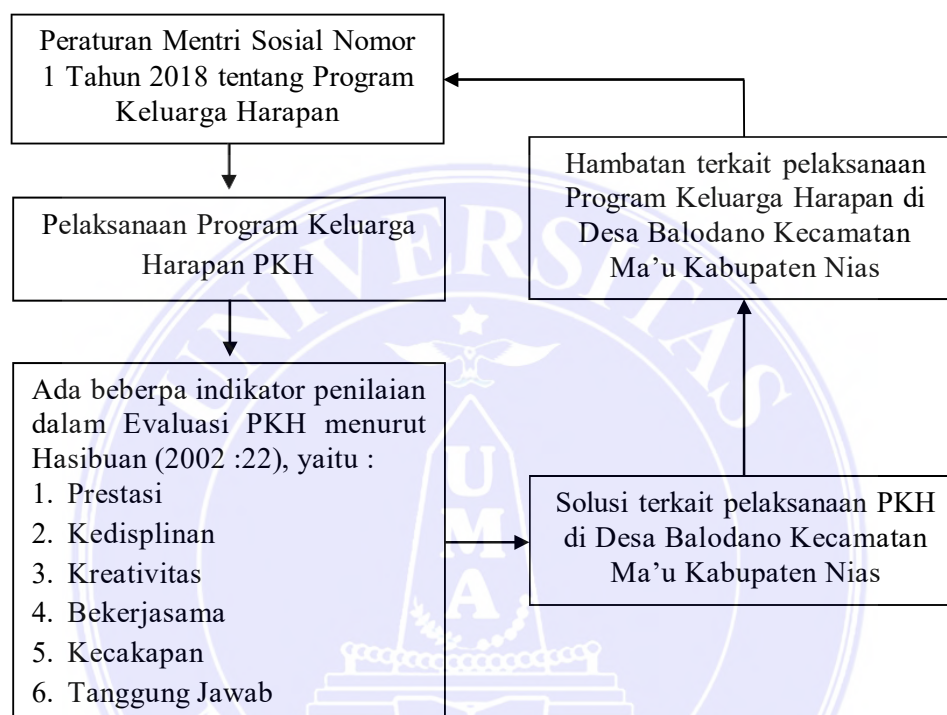
Dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Helvetia Timur”. Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode kualitatif. Melalui metode ini, ditemukan hasil penelitian bahwa efektivitas PKH dalam upaya pengentasan kemiskinan tidak efektif yang mengacu pada teori efektivitas Budiani untuk mencapai efektivitas suatu program.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir adalah sintesa dari berbagai teori dan hasil penelitian yang menunjukkan lingkup satu variabel atau lebih yang teliti, perbandingan nilai satu variabel atau lebih pada sampel atau waktu yang berbeda, hubungan dua

variabel atau lebih, perbandingan pengaruh antara variabel pada sampel yang berbeda dan bentuk hubungan struktural.

Adapun kerangka pemikiran penelitian yang digambarkan oleh penulis adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikir

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, peneliti mengajukan judul “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Balodano Kecamatan Ma’u Kabupaten Nias Tahun 2022” dengan membawa kepada Hasibuan teori yang memuat beberapa indikator evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) (Malay SP Hasibuan, 2002.,p.22), yaitu:

- a) Kinerja adalah hasil kerja yang dilakukan oleh seorang karyawan atau tenaga kerja selama periode waktu tertentu, terhadap kriteria atau standar yang telah ditentukan, objektif atau spesifik.

- b) Disiplin adalah keputusan disiplin yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang diberikan kepadanya.
- c) Kreatifitas adalah penilaian terhadap kemampuan seorang pegawai dalam menggunakan kreatifitasnya untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga pekerjaannya menjadi lebih berdaya dan berhasil.
- d) Bekerjasama adalah penilaian kesediaan karyawan untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dengan karyawan lain, baik secara vertikal maupun horizontal, di dalam dan di luar, untuk melakukan pekerjaannya dengan baik.
- e) Kecakapan adalah penilaian tentang bagaimana berbagai elemen yang terlibat dalam pembuatan kebijakan dan situasi manajemen dapat disatukan dan dikoordinasikan.
- f) Tanggung Jawab adalah penilaian atas kesediaan pegawai untuk bertanggung jawab atas kebijakan, hasil kerja dan hasil kerja, sarana dan prasarana yang digunakan, serta perilaku pegawai.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian digunakan ketika melakukan penelitian pada saat penyusunan skripsi dan penelitian ilmiah lainnya. Menurut V. Wiratna Sujarweni (2014:5) penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, sekaligus sebagai bagian yang penting dalam perkembangan peradaban manusia. Metode penelitian adalah cara ilmiah (rasional, empiris dan sistematis) yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan deskriptif yaitu penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan dan berkaitan dengan studi hubungan sosial, hasil yang didapat dari jenis penelitian ini tidak dapat diperoleh dengan prosedur-prosedur statistik.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan, peneliti melakukan penelitian di Desa Balodano Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias.

Adapun tahapan perincian kegiatan yang akan dilakukan pada penelitian ini, dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Okt 2021	Nov 2021	Des 2021	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Mei 2022	Juni 2022	Juli 2022	Agus 2022	Okt 2022
1	Penyusunan proposal	■	■										
2	Seminar proposal		■										
3	Perbaikan proposal			■	■								
4	Pengambilan Data/Penelitian					■	■						
5	Penyusunan skripsi							■					
6	Seminar hasil								■				
7	Perbaikan Skripsi									■	■	■	
8	Sidang Meja Hijau												■

3.3 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan data dan informasi. Menurut Afrizal (2016:139) Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Dalam penelitian kualitatif, informan dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Informan Kunci

Menurut Afrizal (2016:139) Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Balodano bapak Rano Artafa Gulo, SE., M.Ap.

b. Informan Utama

Menurut Afrizal (2016:139) Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari.

Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah bapak Tarihasugo Gulo (sekretasi desa) dan bapak Faorudu Gulo (ketua BPD) di Desa Balodano.

c. Informan Tambahan

Menurut Afrizal (2016:139) Informan tambahan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah beberapa masyarakat penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) di Desa Balodano yang sebanyak 6 orang (Mitaniat Gulo, Yunirida Gulo, Asalia Halawa, Meniati Waruwu, Rosalina Halawa dan Yenima Laia).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015:308) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.

a. Observasi (pengamatan)

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2015:203) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

b. Interview (wawancara)

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015:317) wawancara didefinisikan sebagai berikut. *“a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint*

construction of meaning about a particular topic". Artinya wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015:329) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

3.5 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2015:336) mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman.

- a. Pengumpulan Data (*Data Collection*) merupakan tahapan untuk menerima data dan informasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi.

- b. Reduksi Data (*Data Reduction*) merupakan tahapan untuk merakum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Tahap reduksi data ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- c. Penyajian Data (*Data Display*) Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Miles dan Huberman (1984) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Artinya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
- d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*) Tahap selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, dan mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah

dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap evaluasi program keluarga harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Balodano Kecamatan Mau Kabupaten Nias. dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan PKH belum berjalan dengan cukup baik sesuai dengan tujuan diluncurkan PKH yaitu dengan harapan mampu memecahkan masalah klasik yang dihadapi RTSM.

PKH yang terselenggarakan di Desa Balodano ada warga yang layak mendapatkan bantuan namun tidak mendapat bantuan, dan adapulah yang tidak layak menerima namun masih saja menerima, serta mereka yang mendapat dana bantuan, dana tersebut kurang memenuhi kebutuhan mereka. Karena ketidak validnya data-data KPM sehingga bantuan yang diterima tidak sesuai dengan aturan dana PKH.

Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan beberapa indikator-indikator prestasi, kedisiplinan, kreatifitas, kerjasama, kecakapan dan tanggung jawab pemerintahan desa di Desa balodano cukup baik terutama mengenai pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) sudah berjalan sesuai dengan instruksi dari kepala desa dan aturan yang ada, hanya saja belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan fungsinya dan masih belum maksimal dikarenakan masih banyak masyarakat memenuhi syarat beserta layak menerima program keluarga harapan (PKH) tersebut.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi program keluarga harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Balodano Kecamatan Mau Kabupaten Nias, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi civitas pendidikan diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan, referensi, pertimbangan dan perbandingan bagi kalangan akademisi, tentang evaluasi program keluarga harapan (PKH), serta dapat menjadi acuan pada penelitian selanjutnya yang relevan atau sejenis.
2. Diharapkan kepada kepala Desa Balodano beserta jajarannya untuk melakukan revisi secepatnya mengenai data-data masyarakat yang menerima program keluarga harapan, karena masih banyak masyarakat yang tergolong miskin yang belum menerima bantuan program PKH dan agar secepatnya mendapat bantuan dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, (2013). Pedoman Operasional Kelembagaan PKH Tahun 2013. Jakarta.
- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, (2014). Pedoman Umum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Jakarta.
- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, (2014). Pedoman Operasional Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia PKH. Jakarta.
- Fajriati, N. I. (2020). Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *1*.
- Mulyadi, S. (2014). Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Prichatin, A. (2019, Oktober). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga.
- Susanto, H. (2016, Juni 14). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- Sugiyono, (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Suryono Haryono. (2010). Memotong Rantai Kemiskinan. Yayasan Sejahtera Mandiri : Jakarta
- Umar, Husain, (1998). Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta : Rajawali Pers.

Jurnal

- Aldzuhri, R. R. (2021, Januari 25). Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Pangung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.
- Amelia, A. (2020, September). Efektifitas Program Keluarga Harapan Dalam Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan.

- Domri. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Politik dan Pemerintah Daerah* , 1.
- Ekardo, A. (2016). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengetasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* , 1.
- Inaya, N. (2021, Oktober). Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Helvetia Timur.
- Infitah, N. (2018). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sumber Kejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. *12 (1907-9990)*.
- Jannah, R. (2019, Januari 16). Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rawaterate Jakarta Timur.
- Mui, R. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penerima Bantuan di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. 5.
- Paisah, S. (2019, Juli 19). Analisis Efektivitas Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.
- Rahayu, S. (2019, Januari 9). Evaluasi Program Keluarga Harapan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Desa Banyusidi Dan Desa Pakis Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang.
- Saputra, K. A. (2019, Maret). Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota.
- Wulandari, F. N. (2020, Agustus). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.
- Yasir, A. (2021). Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Pengetasan Kemiskinan di Desa Sumber Harapan Dusun Solor Medan. 7.
- Yolanita, R. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.
- Yunarni, B. R. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan di Desa Daha Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu. 7.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Berfoto Didepan Kantor Kepala desa Balodano



Gambar 2. Berfoto Bersama Aparat Desa Balodano



Gambar 3. Mewawancarai Salah Satu Aparat Desa Balodano



Gambar 4. Mewawancarai Masyarakat Desa Balodano



Gambar 5. Mewawancarai Masyarakat Desa Balodano



Gambar 6. Mewawancarai Masyarakat Desa Balodano



Gambar 7. Mewawancarai Masyarakat Desa Balodano



Gambar 8. Mewawancarai Masyarakat Desa Balodano